

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

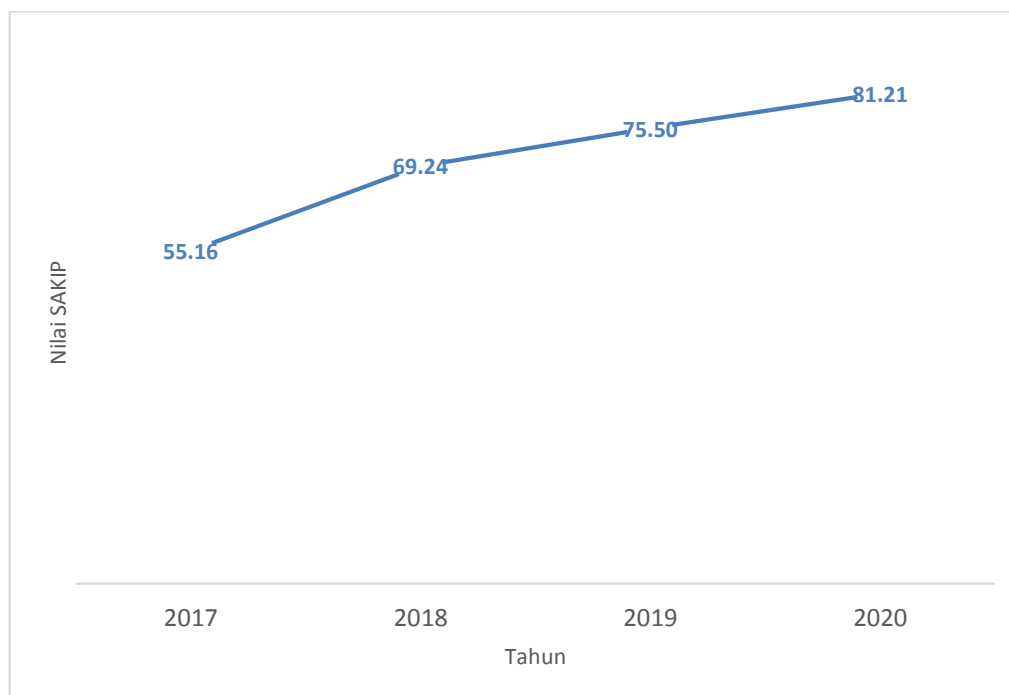
Kinerja instansi pemerintah telah menarik perhatian publik dan menjadi permasalahan sampai saat ini, namun dengan adanya transparansi, informasi dapat diakses secara mudah membuat informasi kinerja lembaga pemerintah disediakan dan dilengkapi, seperti dalam rencana anggaran pemerintah untuk proyek-proyek dan bagaimana pemerintah akan menggunakan pendapatan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal (Ratmono, 2015). Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah merupakan tanggung jawab setiap lembaga pemerintah. Akuntabilitas yang dimaksud melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem keuangan daerah yang *accountabel* dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, mengamanatkan BPKP untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban – kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrument untuk kegiatan 3 control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Rinatiarno dan Azlina, 2011).

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Pamungkas, 2012). Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi SAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Tahun 2019 adalah 75,50 yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya seperti disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 1.1

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Papua (2017-2020)

Sumber: Perwakilan BPKP Povinsi Papua (2020)

Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi yang mengalami peningkatan SAKIP sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, di mana tahun 2020 memiliki nilai SAKIP sebesar 81,21 yang dapat dikategorikan dalam “Predikat A”. Pada tanggal 22 April 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan kegiatan penyerahan hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 atau “SAKIP-RB Award” kepada 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Melalui hasil evaluasi dan pemeringkatan SAKIP, Provinsi Papua tidak masuk kandidat yang mendapat predikat AA, A maupun BB (Inspektorat Kota Medium, 2021), sehingga hal ini menjadi pertanyaan mengenai kebenaran mengenai hasil evaluasi SAKIP Provinsi Papua periode 2017 – 2020.

Selain itu, evaluasi terhadap implementasi SPIP justru mengalami penurunan, tercatat bahwa nilai SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Papua pada tahun 2019 sebesar 3,08, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 2,491 pada tahun 2020. Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 29 Kabupaten Kota, yang mana hasil evaluasi SPIP pada tahun 2020 seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Nilai SPIP Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPIP	No	Kabupaten/Kota	Nilai SPIP
1	Merauke	3,0000	16	Waropen	1,6977
2	Jayawijaya	2,9625	17	Pegunungan Bintang	1,6818
3	Keerom	2,9230	18	Sarmi	1,4602
4	Jayapura	2,8795	19	Yahukimo	1,2830
5	Kepulauan Yapen	2,6193	20	Boven Digoel	1,2739
6	Asmat	2,5818	21	Nduga	1,1761
7	Jayapura	2,2625	22	Puncak	1,1239
8	Nabire	2,1614	23	Mamberamo Raya	1,1159
9	Supior	2,1466	24	Dogiyai	1,0852
10	Puncak Jaya	2,1330	25	Tolikara	1,0557
11	Intan Jaya	2,0568	26	Deiyai	1,0284
12	Lanny Jaya	2,0159	27	Mamberamo Tengah	1,0273
13	Mimika	1,9841	28	Yalimo	1,0205
14	Biak Numfor	1,8680	29	Mappi	1,0011
15	Paniai	1,7000			

Sumber: Perwakilan BPKP Povinnsi Papua (2020)

Data di atas menunjukkan nilai SPIP dari masing-masing Kabupaten/Kota di Papua, yang mana dari ke-29 Kabupaten/Kota hanya ada enam Kabupaten/Kota yang memiliki nilai SPIP diatas rata-rata yaitu Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Keerom, Jayapura, Kepulauan Yapen dan Asmat. Hal ini menunjukkan bahwa

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Papua masih memiliki nilai SPIP yang dibawah rata-rata Provinsi.

Berbagai faktor yang menjadi penyebab tingkat AKIP berbeda-beda masing-masing wilayah. Berbagai penelitian juga telah menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi AKIP yaitu penerapan akuntansi sektor publik (Pamungkas, 2012; Mandasari, 2015; Fariana, 2018). Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal (Santoso & Pambelum, 2008). Penerapan akuntansi sektor publik, memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran (Pamungkas, 2012).

Kualitas laporan keuangan juga dapat berperan dalam menentukan AKIP, hal ini didasarkan atas temuan penelitian bahwa kualitas laporan keuangan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Ridzal, 2020; Pamungkas, 2012). Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Akuntansi sektor publik berperan untuk menyampaikan laporan

keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. Dengan laporan keuangan yang berkualitas maka akan tergambar mengenai tingkat pencapaian kinerja daerah sesuai yang ada.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Provinsi Papua”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Provinsi Papua pada tahun 2020 memiliki nilai SAKIP yang masuk dalam predikat A, namun tidak masuk dalam predikat AA, A maupun B menurut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua tahun 2020 mengalami peningkatan dari periode sebelumnya menjadi 81,21 namun predikat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2020 justru menurun dari dari periode sebelumnya menjadi 2,491.
3. Hanya ada enam (20,7%) Kabupaten/Kota yang memiliki nilai SPIP di atas rata-rata Provinsi Papua.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Seberapa besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharap dapat memberikan beberapa manfaat khususnya bagi para pegawai akuntansi atau keuangan yang terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang akuntansi sektor publik yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Diharapkan juga bagi pihak yang melakukan kualitas laporan keuangan agar dapat

independen dalam melakukannya agar hasil didapatkan adalah hasil yang sesuai kejadian atau fakta yang ada.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Secara teoretis, penelitian ini diharap dapat memberikan beberapa manfaat seperti menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan latar belakang bidang pendidikan praktikan di dunia kerja yang sesungguhnya. Penelitian ini juga sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian.